



Implementasi Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017

Raudhatul Jannah¹, Mardianto²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Email: Raudhaje95@gmail.com

ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara khusus program implamasi Kota Palembang Tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan metode campuran. Teknik pengambilan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teori oleh Marile S.Grindle yang menjelaskan tiga jenis dimensi penelitian yakni kebijakan, konteks kebijakan dan tujuan kebijakan. Ada beberapa aspek di setiap dimensi yang terlibat dalam program NUSP-2. Ini adalah sumber daya yang melibatkan pinjaman sumber dana dari Asian Development Bank (ADB) dan dari pemerintah untuk desa yang disebut Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), tetapi dalam kasus tersebut di tingkat desa, 78% orang tidak mengetahui tentang dana tersebut, disebabkan oleh kurang sosialisasi oleh CA dan LKM tentang dana program NUSP-2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program implementasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di desa kemang agung kecamatan Kertapati kota Palembang pada tahun 2017 berhasil, berdasarkan presentasi hasil menggunakan skala linkert. Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran untuk melanjutkan program NUSP-2, yaitu bagaimana transparansi dana yang diperlukan dan juga peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan fungsi KPP dalam menjaga infrastruktur yang telah dilakukan untuk membuatnya tetap berjalan. Melalui perkampungan kumuh yang ada di desa kemang agung tidak akan ada perkampungan kumuh lagi, dan pemerintah akan mewujudkannya dengan 100 air bersih, 0 daerah miskin dan 100 sanitasi pada tahun 2020 dapat terwujud.

Kata Kunci: Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Implementasi

ABSTRACT. The Purpose of the research is description specifically the Palembang city program implamantation in 2017. The method of the research is using mixed method. The techniqe of taking the data are including observation, interview, documentation and quetioner. This research is used theory by marile S.Grindle who is explaining three kinds of research dimention including, policy, context of policy and the purpose of the policy. There are some aspect in each dimension which is involved in NUSP-2 program. It is resource which is involved the loan of fund resource Asian Development Bank (ADB) and by the goverment it lines to village which also known as Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), but in thereal case in village level, 78% people does not know that the fund, all of these because of less socialiszation by CA and LKM about the fund of NUSP-2 program. The result of this research shows that the implementation program of Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) in kemang agung village kertapati sub-district Palembang city in 2017 is succesful, based on the presentation of result using linkert skala. Based on this research the writer gives the recomendation to continue NUSP-2 program, that is how necessary fund transparency and also the improvement of socialiszation to people and the improvement the function of KPP in keeping infrastucture which has already done to make it keep going on. Through the slum are in kemang agung village will not be slum are anymore, and the goverment will make it happen by 100 clean water, 0 poor area and 100 sanitation in 2020 can be materialized.

The Keywords: Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program, Implementation

PENDAHULUAN

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menurut Undang-Undang Republik "satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah." Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan 3 rencana pembangunan, yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN), yaitu penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dasar negara republik indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi

- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- e. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pembangunan Nasional dalam Ilmu Administrasi Negara adalah bentuk aplikasi Paradigma *New Public Service*. Ada beberapa konsep yang membangun perkembangan ilmu administrasi negara pada periode ketiga (*New Public Service*), salah satu konsep tersebut yaitu *Citizenship Democratic*. Menurut Sandel (2008:86), *Citizenship Democratic* merupakan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemerintahan. Warga negara tidak hanya melihat dari perspektif individu dalam persoalan yang lebih besar, namun dia melihat semua persoalan yang lebih besar untuk kepentingan umum. Guna mewujudkan Pembangunan Nasional mencapai tujuan bernegara maka salah satu Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya

permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah mewujudkan sasaran untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya mengeluarkan Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2016 menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Berdasarkan Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 40 Tahun 2016 menjelaskan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011. Dalam rangka mendukung upaya penanganan wilayah kumuh perkotaan di wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mencanangkan target 100-0-100 yaitu target program pembangunan bidang cipta karya sebagaimana tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019, yaitu memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada tahun 2020.

Program KOTAKU sebagai salah satu dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SGDs sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dari 17 tujuan TPB/SDGs terdapat 2 tujuan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan Program KOTAKU yaitu :

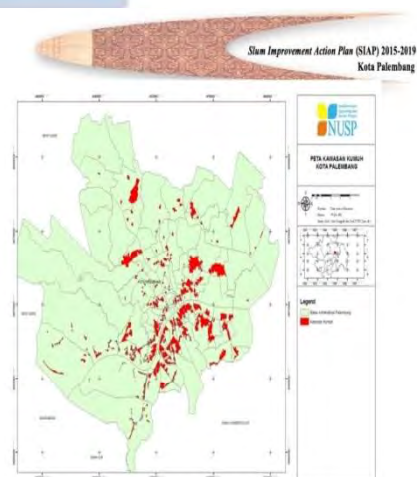
- 1) Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; dan
- 2) Tujuan 12: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Edaran Kementrian

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor 40 SE/DC/2016 bahwa Program KOTAKU dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi di seluruh Indonesia, salah satu kota yang terpilih dalam Program KOTAKU yaitu Kota Palembang. Berdasarkan SK Walikota Palembang Nomor 488 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman bahwa Kawasan permukiman Kumuh di Kota Palembang terdapat di 59 kelurahan.

Kawasan kumuh di Kota Palembang dapat dilihat pada peta *Slum Improvement Action Plan* (SIAP) 2015-2019 Kota Palembang pada gambar 1.1 dengan keterangan warna merah pada peta yaitu kawasan kumuh dan keterangan warna hijau pada peta yaitu batas administrasi Kota Palembang.

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Palembang berdasarkan hasil wawancara dari Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengatakan Program KOTAKU dilaksanakan melalui *National Slum Upgrading Program* (NSUP) dan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang penetapan lokasi Program Kota Tanpa Kumuh.



Gambar 1.1 Peta Permukiman Kumuh Kota Palembang

Sumber: SK Walikota Palembang Nomor 488 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh.

Program NSUP merupakan program yang dilaksanakan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru,

sedangkan Program NUSP-2 merupakan program peningkatan kualitas permukiman di perkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yang mendukung upaya penangan wilayah kumuh di perkotaan dengan menyediakan pembangunan infrastruktur pada beberapa jenis komponen. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pelaksanaan Program KOTAKU melalui kegiatan NUSP-2 karena Program NSUP belum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Program NUSP-2 Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Direktorat Jendral Cipta Karya Nomor 40

SE/DC/2016 bahwa Program NUSP-2 dilaksanakan di 20 Kelurahan. Di Kota Palembang kegiatan NUSP-2 dilaksanakan di 20 Kelurahan berdasarkan SK Walikota Palembang Nomor SK Walikota N0 546/KPTS/DIS PU CK & Perumahan /2015 tentang perubahan lokasi No 90/KPTS/ PU CK & Perumahan/ 2015 yaitu dari 4 kelurahan menjadi 20 Kelurahan. Berikut ini daftar 20 Kelurahan yang terpilih dalam pelaksanaan Program NUSP-2 di Kota Palembang.

Tabel 1.1 Lokasi kegiatan NUSP-2 di Kota Palembang

Sumber: SK Walikota N0 546/KPTS/DIS PU CK & Perumahan /2015

No	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	LUAS WILAYAH KUMUH (Ha)	TINGKAT KEKUMUHAN
1	Karya Jaya	Kertapati	1608	10,09	Kumuh sedang
2	Kemang Agung	Kertapati	160	13,77	Kumuh sedang
3	Kemas Rindo	Kertapati	1622	21,28	Kumuh sedang
4	Tuan Kentang	Seberang Ulu1	43	10,71	Kumuh ringan
5	2 Ulu	Seberang Ulu1	43	13,69	Kumuh berat
6	15 Ulu	Seberang Ulu1	81	17,56	Kumuh sedang
7	1 Ulu	Seberang Ulu1	62	30,37	Kumuh berat
8	Silaberanti	Seberang Ulu1	390	22,23	Kumuh berat
9	9-10 Ulu	Seberang Ulu1	43	30,95	Kumuh sedang
10	11 Ulu	Seberang Ulu2	25	15	Kumuh berat
11	12 Ulu	Seberang Ulu2	17	8,5	Kumuh sedang
12	13 Ulu	Seberang Ulu2	100	60	Kumuh berat
13	14 Ulu	Seberang Ulu2	109	65,4	Kumuh berat
14	16 Ulu	Seberang Ulu2	394	197	Kumuh sedang
15	Pulokerto	Gandus	3491	10,14	Kumuh sedang
16	Gandus	Gandus	2953	10,14	Kumuh sedang
17	Plaju Darat	Plaju	337	19,2	Kumuh sedang
18	Plaju Ilir	Plaju	232	12,7	Kumuh sedang
19	Kuto Batu	Ilir Timur 2	33	13	Kumuh sedang
20	Kebun bunga	Sukarame	653,05	326,5	kumuh sedang

Sumber: SK Walikota N0 546/KPTS/DIS PU CK & Perumahan /2015

Dari 20 Kelurahan pelaksanaan Program NUSP-2 berdasarkan hasil wawancara dengan PPK di Dinas PUPR bahwa pelaksanaannya baru dilaksanakan di Kelurahan prioritas yaitu Kelurahan Kemang Agung, 15 Ulu, 1 Ulu dan Karya Jaya. Kelurahan prioritas merupakan kelurahan yang memiliki kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan

perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. keempat kelurahan ini masuk ke dalam kriteria prioritas penanganan melalui Program NUSP-2 dengan alasan:

- a. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat kota metropolitan

- b. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan

Kriteria kelurahan yang menjadi prioritas pelaksanaan Program NUSP-2 berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Direktorat Jendral Cipta Karya. Dari keempat kelurahan prioritas pelaksanaan Program NUSP-2 ini berdasarkan hasil wawancara dengan PPK Dinas PUPR Kota Palembang yang mengatakan :

"Program NUSP-2 ini dilaksanakan terlebih dahulu kepada kelurahan yang diprioritaskan yaitu kelurahan Kemang Agung, 15 Ulu, 1 Ulu dan karya jaya. Dari keempat kelurahan ini yang paling berhasil pelaksanaannya yaitu

- c. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.

Kelurahan Kemang Agung hal ini berdasarkan data hasil pengurangan kawasan kumuh melalui Program NUSP-2."

Pernyataan ini didukung pula dengan data pengurangan kawasan kumuh melalui NUSP-2 di Kelurahan Kemang Agung pada Tabel 1.2. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai program KOTAKU di Kelurahan Kemang Agung terutama pada pelaksanaan atau implementasinya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran keberhasilan pelaksanaan Program KOTAKU melalui NUSP-2 di Kelurahan Kemang Agung

Tabel 1.2 Daftar pengurangan luas kawasan kumuh Kelurahan Kemang Agung dari Program NUSP-2

No	Kelurahan	Luas Kumuh Awal(Ha) Base Sk	Pengurangan Kumuh TA 2015	Status Kumuh TA 2016	Pengurangan Kumuh TA 2016	Status Kumuh TA 2017
1	Kemang Agung	13,77	1,81	11,96	3,40	8,56
2	15 Ulu	17,56	1,67	15,89	5,14	10,75
3	1 Ulu	30,37	0,80	29,57	1,20	28,75
4	Karya Jaya	10,09	0,79	9,30	0,88	8,42

Sumber: Dokumentasi Dinas PUPR Kota Palembang Tahun 2017

TINJAUAN PUSTAKA Kebijakan Publik

David Easton (2008:207) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (2008:207) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan Publik

Pressman dan Wildafsky (2015:20) sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dekadanya. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memahami janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian

Dari beberapa teori mengenai implementasi maka teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Merilee S. Grindle, dalam *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (2015:74)

mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian campuran atau *mixed methode*. Menurut Creswell (2016:28), penelitian dengan metode campuran ini melakukan penelitian dengan asumsi bahwa mengumpulkan berbagai jenis data yang dianggap terbaik dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dapat dimulai dengan survei secara luas agar dapat dilakukan generalisasi terhadap penelitian dari populasi yang telah di tentukan populasi yang telah ditentukan daalam penelitian ini yaitu masyarakat Kelurahan Kemang Agung. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan wawancara kualitatif dengan infroman yang berhubungan dengan implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau tatap muka langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, dengan membaca literatur-literatur, laporan-laporan, peraturan-peraturan, buku-buku perpustakaan, dan dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan program. Instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Teknik pengumpulan Data, observasi, wawancara, dokumen, kuesioner. Teknik keabsahan data, dalam keabsahan data dilakukan proses triangulasi, selanjutnya untuk melihat keabsahan data digunakan strategi triangulasi konkuren. Teknik analisis data, transformasi data, mengeksplorasi outlier-outlier, membuat instrument, menguji level-level ganda, membuat matriks/tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan data akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan mengenai implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kemang Agung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2017 dengan menggunakan dimensi dan aspek dari model implementasi Merilee S. Grindle:

1. ISI KEBIJAKAN

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

- 1) Kepentingan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana dalam mewujudkan Kota Tanpa Kumuh
- 2) Kepentingan masyarakat Kelurahan Kemang Agung untuk meningkatkan kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan infrastruktur.

Dalam pelaksanaan Program NUSP-2 peranan Dinas PUPR merupakan Tim pelaksana ditingkat kabupaten/kota yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR. Dinas PUPR berperan dalam pelaksanaan NUSP-2 bertugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan keseluruhan kegiatan proyek, dengan tugas dan fungsi.

Tabel 4.1 Kepentingan masyarakat Kelurahan Kemang Agung dalam Program NUSP-2

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat penting	15	15%	60
2.	Penting	79	79%	237
3.	Cukup penting	6	6%	12
4.	Tidak penting	-	-	-
Jumlah		100	100	309

Sumber: diolah dari data primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program NUSP-2 bagi masyarakat Kelurahan Kemang Agung ini penting untuk dilaksanakan, karena (79%) masyarakat menjawab pelaksanaan Program NUSP-2 bagi masyarakat Kelurahan Kemang Agung penting untuk dilaksanakan.

b. Tipe manfaat

Manfaat Program NUSP-2 bagi

masyarakat Kelurahan Kemang Agung yaitu sebagai upaya peningkatan kualitas kawasan atau lingkungan permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur. Beberapa manfaat dari program NUSP-2 ini yaitu diharapkan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Tipe manfaat Program NUSP-2 bagi masyarakat Kelurahan Kemang Agung

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat bermanfaat	13	13%	52
2.	Bermanfaat	83	83%	249
3.	Cukup bermanfaat	4	4%	8
4.	Tidak bermanfaat	-	-	-
Jumlah		100	100	309

Sumber: diolah dari data primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program NUSP-2 bagi masyarakat Kelurahan Kemang Agung ini memiliki manfaat, karena 83% masyarakat menjawab Program NUSP-2 memiliki manfaat yang artinya program ini benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh karena akses infrastruktur

permukiman kumuh Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan umum telah menyiapkan Program NUSP-2. Melalui Program NUSP-2, maka disusunlah laporan Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau yang di sebut NUAP. NUAP menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) dan Pembiayaan Program/kegiatan NUSP-2 di Kelurahan Kemang Agung.

Sebagai upaya mengatasi masalah kawasan

Tabel 4.3 Perubahan yang dirasakan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dalam Program NUSP-2

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat berubah	7	7%	28
2.	Berubah	89	89%	267
3.	Cukup berubah	4	4%	8
4.	Tidak berubah	-	-	-
Jumlah		100	100	303

Sumber: diolah dari data primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Program NUSP-2 bagi masyarakat Kelurahan Kemang Agung ini memiliki perubahan, karena 89% masyarakat menjawab perubahan yang dirasakan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dalam Program NUSP-2 berubah, yang artinya pembangunan infrastruktur benar-benar dilaksanakan sesuai dengan RKM yang ada sehingga perubahan dari setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar dirasakan

masyarakat.

Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan tentang keterlibatan peran pelaku dalam pelaksanaan persiapan NUSP-2 dalam atau implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang pada Tahun 2017 yaitu melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat. Berdasarkan petunjuk

teknis pelaksanaan LKM bertugas untuk informasi Program NUSP-2 secara terus melakukan sosialisasi dan menyebarkan meneruskan kepada masyarakat.

Tabel 4.4 Letak pengambilan keputusan keterlibatan LKM dalam Program NUSP-2 Melalui sosialisasi

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat mengetahui	2	2%	8
2.	Mengetahui	53	53%	159
3.	Cukup mengetahui	45	45%	90
4.	Tidak mengetahui	-	-	-
Jumlah		100	100	257

Sumber: diolah dari data primer, april 2018

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui adanya keputusan keterlibatan peran pelaku atau LKM dalam pelaksanaan atau implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang pada Tahun 2017, karena (53%) masyarakat memilih mengetahui Kelurahan Kemang Agung menjadi lokasi Pelaksanaan Program NUSP-2.

Pelaksana Program Program NUSP-2 pada setiap tingkatan memiliki tanggung jawab sesuai peran dan fungsinya. Secara umum berdasarkan organisasi pelaksana NUSP-2 di tingkat kelurahan terdiri dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan pendampingan oleh *Community Advisor*.

Tabel 4.5 Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan Kelurahan Kemang Agung pada Program NUSP-2 Tahun 2017

Nama Pekerjaan	Pemeliharaan	
	Kegiatan	Frekuensi
Pekerjaan Jalan	1. Pembersihan secara umum 2. Membuang tumbuhan liar dan sampah (terutama di bahu jalan dan saluran samping jalan) 3. Penanganan kerusakan ringan	1. Satu minggu sekali 2. Dua minggu sekali 3. Bila terjadi kerusakan
Drainase	1. Pembersihan secara umum 2. Membuang tumbuhan liar dan sampah 3. Pembersihan dan melancarkan fungsi prasarana 4. Penanganan kerusakan-kerusakan ringan	1. Satu minggu sekali 2. Dua minggu sekali 3. Sebulan sekali 4. Bila terjadi kerusakan
Lampu Penerangan	1. Pembersihan secara umum; 2. Pengecekan bagian-bagian lampu lampu dan perangkatnya 3. Penanganan kerusakan-kerusakan ringan	1. Satu minggu sekali 2. Dua minggu sekali 3. Bila terjadi kerusakan
Bak Sampah	1. Pembersihan secara umum; 2. Penanganan kerusakan-kerusakan ringan	1. Satu minggu sekali 2. Bila terjadi kerusakan

Sumber: Dokumen RKM Kelurahan Kememag Agung Tahun 2017

Tabel 4.7 Peran masyarakat di Kelurahan Kemang Agung dalam Program NUSP-2

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat mengetahui	27	27%	108
2.	Mengetahui	54	54%	162
3.	Cukup	19	19%	38

4.	mengetahui			
	Tidak mengetahui	-	-	-
Jumlah		100	100	308

Sumber: Diolah dari data Primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui keterlibatan

masyarakat dalam Program NUSP-2, karena 54% masyarakat memilih mengetahui Peran masyarakat di Kelurahan Kemang Agung dalam Program NUSP-2.

d. Sumber Daya yang dilibatkan .

1) Sumber Daya berupa Dana

Dana pelaksanaan NUSP-2 bersumber dari pinjaman pemerintah kepada ADB (*Asian Development Bank*). Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan *Asian Development Bank* (ADB) Nomor 3122-INO Tanggal 23 April 2014 tentang *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) selanjutnya Pemerintah pusat menyalurkan

dana kepada kelurahan-kelurahan lokasi sasaran NUSP-2 yang telah ditetapkan, melalui rekening Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sebagai organisasi pelaksana pada tingkat kelurahan dan masyarakat. Pengelolaan dana BPM tingkat masyarakat dilaksanakan oleh BKM/LKM sebagai organisasi masyarakat pelaksana NUSP-2. Agar BKM/LKM dapat melakukan pengelolaan keuangan secara benar, maka diperlukan petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (pengelolaan dana BPM).

Tabel 4.8 Sumber daya berupa dana dalam Program NUSP-2 di Kelurahan Kemang Agung

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat mengetahui	2	2%	8
2.	Mengetahui	5	5%	15
3.	Cukup mengetahi	16	16%	32
4.	Tidak mengetahui	78	78%	78
Jumlah		100	100	133

Sumber: diolah dari data primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui dana dalam Program NUSP-2, karena 78% masyarakat memilih tidak mengetahui dana dalam Program NUSP-2, yang artinya hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara dengan LKM yang menyatakan dana dikelola berdasarkan prosedur dan memiliki laporan pertanggungjawaban, dimana berdasarkan petunjuk pelaksanaan Program NUSP-2 harus

bersifat transparan. Data yang diperoleh peneliti masih bersifat kuantitatif dengan skala likert sehingga perlu diolah untuk proses penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik, teknik ini mengukur berapa banyak presentase yang didapat pada indikator tiap dimensi dengan butir pertanyaan, berikut penarikan kesimpulan dari dimensi isi Kebijakan.

Tabel 4.9 Persentase Dimensi Isi Kebijakan

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Pencapaian	
		SB (4)	B (3)	CB (2)	TB (1)	Jumlah	%	Ket
1.	Kepentingan masyarakat Kelurahan Kemang Agung	15	79	6	-	309	77%	Berhasil
2.	Manfaat Program NUSP-2	18	83	4	-	309	77%	Berhasil
3.	Perubahan yang dirasakan masyarakat	7	89	4	-	303	75%	Berhasil
4.	Masyarakat mengetahui adanya program NUSP-2	2	53	43	-	257	64%	Berhasil
5.	Keterlibatan	27	54	19	-	308	77%	Berhasil

	masyarakat dalam pelaksanaan Program							
6.	Sumber daya berupa dana	2	5	16	78	133	33%	Tidak berhasil
Total							67 %	

Sumber: Diolah penulis, 2018

Berdasarkan hasil dari enam pernyataan tentang dimensi isi kebijakan memiliki jumlah rata-rata skor capaian persentase sebesar 67% dapat disimpulkan bahwa pengaruh isi kebijakan terhadap implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 adalah berhasil.

3. Konteks Kebijakan Kekuasaan , kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Pelaksanaan kegiatan atau Program NUSP-2 tidak terlepas dari kekuasaan,

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Kekuasaan, kepentingan aktor yaitu LKM dan CA selaku pelaksana di tingkat kelurahan dalam upaya melaksanakan program melalui pemangunan infrastruktur dengan strategi yang mengacu pada dokumen rencana aksi yang telah disusun (NUAP). Rencana kerja tersebut memuat langkah-langkah nyata upaya pelibatan masyarakat. Rencana Kerja Masyarakat (RKM) merupakan dokumen perencanaan pembangunan penanganan kumuh skala lingkungan untuk satu tahun yang disusun oleh masyarakat.

4.9 Tipologi Kontruksi

No	Komponen infrastruktur	Kontruksi	RT
1.	Jalan Lingkungan	a. Jalan cor beton	12, 16, 17, 18
2.	Jembatan	b. Jerambah cor beton	16, 17, 18, 19
3.	Drainase Lingkungan	a. Drainase	16, 19
		b. Drainase & Jalan	17, 19
4.	Persampahan	Bak Sampah	16
		Kotak Sampah	17
5.	Lampu Penerangan Jalan	Tiang lampu baja galvanis + pondasi batu	17

Sumber: Dokumen RKM Kelurahan Kemang Agung Tahun 2017

Selanjutnya untuk lebih jelas strategi aktor dalam program tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk memperkuat pernyataan dari informan maka dapat diuraikan juga pernyataan dari para responden sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.10 Strategi pelaksanaan Program NUSP-2 berdasarkan RKM

No	Kategori	Frekuensi	Presentase	Nilai Bobot
1.	Sangat mengetahui	13	13%	52
2.	Mengetahui	71	71%	213
3.	Cukup mengetahui	14	14%	28
4.	Tidak mengetahui		2%	2
Jumlah		100	100	295

Sumber: diolah dari data primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui strategi pelaksanaan dalam

pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 berdasarkan RKM, karena (71%) masyarakat memilih mengetahui tahapan pembangunan an apa saja yang akan dilaksanakan sesuai dengan RKM.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik atau peran lembaga Dinas PUPR dalam pelaksanaan NUSP-2 hanya sebatas memverifikasi kegiatan seperti NUAP dan RKM kemudian agar dana yang dibutuhkan masyarakat dapat dicairkan. Tidak hanya memverifikasi KRM, Dinas PUPR juga menerima dokumen laporan akhir dari LKM yang di dampingi CA apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sehingga dengan adanya laporan tersebut Dinas PUPR kemudian mengevaluasi ke Kelurahan. Untuk pelaksanaan kegiatan sendiri LKM yang didampingi CA yang berperan penuh dalam pelaksanaan pembangunan

infrastruktur.

Tabel 4.11 Karakteristik Dinas PUPR Kota Palembang

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat mengetahui	4	4%	16
2.	Mengetahui	54	54%	162
3.	Cukup mengetahui	23	23%	46
4.	Tidak mengetahui	19	19%	19
Jumlah		100	100	243

Sumber: diolah data primer, 2018

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui adanya tim evaluasi dari Dinas PUPR dalam Program NUSP-2 di Kelurahan Kemang Agung, karena 54% masyarakat memilih mengetahui adanya tim evaluasi dari Dinas PUPR dalam Program NUSP-2 di Kelurahan Kemang Agung sehingga dengan adanya evaluasi dari Dinas PUPR dapat diketahui apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

a. Kepatuhan dan Daya tanggap

Rembug Khusus Perempuan III pada tahap pelaksanaan pekerjaan Infrastruktur dilakukan sebelum kegiatan Musyawarah Kelurahan IV. Pelaksanaan rembug dapat

dilakukan secara paralel dengan kegiatan penandatanganan kontrak (SP3). Kegiatan rembug khusus perempuan pada tahap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur bertujuan untuk menjangkau aspirasi kaum perempuan.

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan dalam proses pelaksanaan kegiatan/Program NUSP-2 bahwasannya 30% keterlibatan pelaksanaan NUSP-2 adalah perempuan. Kegiatan rembug khusus perempuan pada tahap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lingkungannya.
- b. Terjangkainya aspirasi dan partisipasi warga perempuan di dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur.
- c. Terseleksinya wakil perempuan yang akan terlibat di dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, dan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan.
- d. Mendorong partisipasi kaum perempuan untuk terlibat dalam supervisi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- e. Menampung usulan kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan.

Tabel 4.12 Kepatuhan dan daya tanggap kaum perempuan di Kelurahan KemangAgung dalam Program NUSP-2

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat mengetahui	7	7%	28
2.	Mengetahui	82	82%	246
3.	Cukup mengetahui	7	7%	14
4.	Tidak mengetahui	4	4%	4
Jumlah		100	100	292

Sumber: diolah dari data primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui adanya kepatuhan dan daya tanggap berupa keterlibatan perempuan dalam Program NUSP-2 keterlibatan masyarakat dalam Program NUSP-2, karena (81%) masyarakat memilih mengetahui adanya kepatuhan dan daya tanggap berupa keterlibatan perempuan dalam Program NUSP-2 yang artinya masyarakat Kelurahan Kemang Agung melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan terkait Program NUSP-2.

Data yang diperoleh peneliti masih

bersifat kuantitatif dengan skala likert sehingga perlu diolah untuk proses penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik, teknik ini mengukur berapa banyak presentase yang didapat pada indikator tiap dimensi dengan butir pertanyaan. Berdasarkan hasil dari tiga pernyataan tentang dimensi konteks kebijakan memiliki jumlah rata-rata skor capaian presentase sebesar 69% dapat disimpulkan bahwa pengaruh konteks kebijakan terhadap implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 adalah berhasil.

berikut penarikan kesimpulan dari konteks Kebijakan.

Tabel 4.13 Persentase dimensi konteks kebijakan

No	Pernyataan	Jawaban Responden					Skor Pencapaian	
		SB (4)	B (3)	CB (2)	TB (1)	Jumlah	%	Ket
1.	Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam Program NUSP-2	13	71	14	2	295	73%	Berhasil
2.	Karakteristik Dinas PUPR dalam melaksanakan Program NUSP-2	4	54	23	19	243	60%	Berhasil
3.	Kepatuhan dan daya tanggap masyarakat	7	82	7	4	292	73%	Berhasil
Total							69%	Berhasil

Sumber: diolah dari data primer, april 2018

3. Tujuan Kebijakan

a. Hasil Kebijakan

Sebagai upaya mengatasi masalah kawasan permukiman kumuh Direktorat Jendral Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan program NUSP-2. NUSP-2 merupakan program peningkatan kualitas pada kawasan atau lingkungan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan berbasis atau digerakkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki

kondisi kehidupan masyarakat penghuni kawasan atau lingkungan permukiman kumuh di perkotaan. Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diraih. Hasil yang ingin dicapai dari program NUSP-2 ini berdasarkan petunjuk teknik Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai berdasarkan petunjuk teknik pelaksanaan RKM.

Tabel 4.14 Hasil pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 berdasarkan RKM

No	Kategori	Frekuensi	Persentase	Nilai Bobot
1.	Sangat berhasil	12	12%	48
2.	Berhasil	86	86%	258
3.	Cukup berhasil	2	2%	4
4.	Tidak berhasil	-	-	-
Jumlah		100	100	310

Sumber: diolah dari data primer, April 2018

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan hasil dari pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2, karena (86%) masyarakat memilih pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 adalah berhasil, hasil wawancara juga menyatakan pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 adalah berhasil.

b. Dampak Kebijakan

Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh. Setelah adanya hasil kebijakan maka akan diketahui dampak yang terjadi kepada masyarakat Kelurahan Kemang Agung setelah terlaksananya kegiatan NUSP-2 yang dilihat dari aspek pembangunan

infrastruktur. Dampak yang dirasakan masyarakat terkait Program NUSP-2 terhadap pembangunan infrastruktur terdiri dari Dampak pembangunan drainase, jalan cor beton, jerambah cor beton, bak sampah, motor

sampah, dan lampu jalan serta dampak pembangunan infrastruktur yaitu berkurangnya kawasan kumuh di Kelurahan Kemang Agung.

Tabel 4.15 Dampak pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 berdasarkan RKM

No	Kategori	Frekuensi	Presentase	Nilai Bobot
1.	Sangat merasakan	10	10%	40
2.	Merasakan	86	86%	258
3.	Cukup merasakan	4	4%	8
4.	Tidak merasakan	-	-	-
Jumlah		100	100	306

Sumber: diolah dari data primer, april 2018

Melalui tabel diatas, dapat diketahui presentase yang menyatakan bahwa (10%) masyarakat memilih sangat merasakan dampak positif dari hasil pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2, (86%) masyarakat memilih merasakan dampak positif dari hasil pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2, (4%) masyarakat memilih cukup merasakan dampak positif dari hasil pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2 dan tidak ada masyarakat memilih tidak merasakan dampak positif pembangunan infrastruktur dalam Program NUSP-2. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara dengan CC NUSP-2 Kota Palembang berkurangnya kawasan kumuh di Kelurahan Kemang Agung sebesar 2,40 ha dari total kawasan kumuh Kelurahan Kemang Agung.

Data yang diperoleh peneliti masih bersifat kuantitatif dengan skala likert sehingga perlu diolah untuk proses penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik, teknik ini mengukur berapa banyak persentase yang didapat pada indikator tiap dimensi dengan butir pertanyaan. Berdasarkan hasil dari dua pernyataan tentang dimensi tujuan kebijakan memiliki jumlah rata-rata skor pencapaian presentase sebesar 76% dapat disimpulkan bahwa dimensi tujuan kebijakan terhadap implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 adalah berhasil. Berikut penarikan kesimpulan dari dimensi tujuan Kebijakan.

Tabel 4.16 Persentase dimensi tujuan kebijakan

No	Pernyataan	Jawaban Responden				Jumlah	Skor Pencapaian	
		SB (4)	B (3)	CB (2)	TB (1)		%	Ket
1.	Hasil Kebijakan	12	86	2	-	310	77%	Berhasil
2.	Dampak dari kebijakan	10	86	4	-	306	76%	
Total							76%	Berhasil

Sumber: Diolah data primer, 2018

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2017 maka dapat disimpulkan yaitu dalam mewujudkan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui Program NUSP-2, berhasil dalam menjalankan fungsinya untuk menangani wilayah kumuh

perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya kawasan kumuh Kelurahan Kemang Agung sebanyak 2,40 Ha. Pada dimensi isi kebijakan terdapat aspek sumber daya yang dilibatkan pada Program NUSP-2 yaitu sumber daya yang dilibatkan berupa sumber dana pinjam *Asian Developemnet Bank* (ADB) yang kemudian pemerintah pusat menyalurkan kepada kelurahan yang disebut Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), namun pelaksanaannya ditingkat kelurahan

kurang transparansi kepada masyarakat hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh CA dan LKM tentang dana dalam Program NUSP-2. Serta pada dimensi isi kebijakan terdapat aspek pelaksana program dimana Kurangnya peran KPP dalam merawat infrastruktur yang telah dikerjakan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan Program NUSP-2 ini antara lain:

1. Dibutuhkan sosialisasi oleh CA dan LKM kepada masyarakat tentang sumber daya berupa dana yang di kelola dalam Program NUSP-2 di Kelurahan Kemang Agung sehingga transparansi dana kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat 1, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
2. Perlunya peningkatan peranan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dikerjakan pada tahun 2017 agar kawasan kumuh yang telah berkurang tidak menjadi kumuh kembali. Sehingga tujuan penanganan wilayah kumuh pada akhir tahun 2020 dapat terlaksana yaitu Program KOTAKU dengan 100-0-100. Yaitu tersedianya air minum 100%, 0% wilayah kumuh dan tersedianya sanitasi lingkungan 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
- Purwanto, Erwan Agus dan Ratih Sulistyastuti, Dyah .2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Singarimbun, Masri Dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LPSS.
- SK Walikota Palembang Nomor 488 Tahun 2014 tentang penetapan Lokasi Kawasan Permukiman kumuh .
- SK Walikota Palembang Nomor 2.a KPTS/DIS PU CK & PERUMAHAN tentang pembentukan tim koordinasi dan unit pengaduan masyarakat *Neighborhood upgrading shelter Project Phase 2* (NUSP-2).
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi : Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoah , Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Wahab, S Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan publik*. Jakarta: PT Bumi Askara.